

Implementasi Program Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara)

**Readel Rolos¹
Ronny Gosal²
Fanley Pangemanan³**

ABSTRAK

Pembangunan pendidikan di daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan bangsa, kualitas sumber daya manusia dapat ditentukan melalui sector pendidikan, oleh sebab itu kebijakan dalam sector pendidikan diperlukan untuk meningkatkan sumberdaya manusia di daerah. Pemberian bantuan bagi mahasiswa terutama dalam penyelesaian studi dirasa ampuh untuk mendorong meningkatkan motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara selama ini memberikan bantuan bagi mahasiswa studi akhir yang akan menyelesaikan studinya. Program tersebut diharapkan mampu membantu mahasiswa yang kurang mampu untuk menyelesaikan studinya. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori Geoge C. Edward Edward III dalam buku hayat (2018:128-129) Berpandangan bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi; Struktur Birokrasi. Informan yang digunakan adalah informan yang dianggap memiliki kapasitas guna menjawab setiap pertanyaan yang timbul dari penelitian. Dalam hasil penelitian, dari keempat indikator mengenai keberhasilan kebijakan publik tersebut, dapat dikategorikan baik, hanya aspek sumberdaya manusia yang masih dianggap kurang dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan penyelesaian pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara yang di selenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kata Kunci : Implementasi, Pemerintah, Bantuan Studi

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan Bagi Siswa SMA / MA, SMK Dan Mahasiswa. Tujuan pemberian bantuan penyelesaian pendidikan khusus mahasiswa dalam pasal (3) PERBUP No. 16 Tahun 2017 yaitu: membantu para mahasiswa yang dalam proses penyelesaian pendidikan, dan mengurangi mahasiswa yang *drop out* sebagai akibat biaya pendidikan, dengan tidak membedakan suku, agama, dan golongan, dengan sasaran mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan menyelesaikan pendidikan. Dengan wujud nyata ingin mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan buktinya memberikan bantuan akhir studi bagi pelajar yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui program dari dinas pendidikan dari tingkat SMU, D3, S1, S2, S3 yang sudah 3 tahun berjalan dari tahun 2017 sampai tahun ini. Di tahun 2018 bantuan akhir studi disalurkan ke pelajar SMA/SMK yang berjumlah 1277 siswa, program bantuan akhir studi ini menjadi harapan baru terutama bagi pelajar yang termasuk kategori kurang mampu yang bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Tenggara. Harapan ini menghidupkan semangat baru lebih khusus yang ingin menyelesaikan studi di tingkat Perguruan Tinggi karena banyaknya biaya yang akan digunakan dalam proses penyelesaian studi tersebut. Setiap kebijakan yang di keluarkan masih terdapat masalah yang di hadapi dalam proses penyaluran bantuan tersebut masih belum efektif dan efisien.

Penyaluran bantuan tersebut masih belum mencakup seluruh mahasiswa Minahasa Tenggara yang kuliah di Perguruan Tinggi yang ada di Sulawesi Utara baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, data yang di peroleh di tahun 2018 penerima bantuan khususnya mahasiswa terdiri dari 300

mahasiswa Strata 1 (satu), angka tersebut menunjukkan minimnya mahasiswa yang akan menyelesaikan studi di tingkat Perguruan Tinggi dan juga pembatasan kuota yang di muat dalam program yaitu hanya sebanyak 300 orang mahasiswa yang bisa menerima bantuan tersebut setiap tahunnya sedangkan masih ada mahasiswa yang membutuhkan bantuan tersebut di tahun yang sama tapi tidak bisa menerimanya karena kuota terbatas.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan program bantuan akhir studi bagi pelajar yang di tangani langsung oleh dinas pendidikan, program ini bertujuan untuk membantu penyelesaian pendidikan dengan memberikan masing-masing untuk tingkat SMU Rp 500.000, D3 Rp 2,5 juta, S1 Rp 5 juta, dan S2 Rp 7,5. Bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi dengan memenuhi persyaratan yang telah di tentukan. Yaitu: kuliah di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP Minahasa Tenggara), foto copy Kartu Keluarga, foto copy kartu mahasiswa, surat keterangan aktif kuliah di tandatangani Ketua Jurusan atau Kaprodi, surat keputusan Dekan/Direktur tentang pelaksanaan seminar proposal penelitian atau seminar ujian hasil penelitian/karya tulis atau ujian komperhensif, surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan dari pemerintah atau lembaga lainya (ditandatangan di atas meterai), proposal yang sudah di tandatangani minimal oleh penasehat akademis, proposal permohonan bantuan akhir studi ke Bupati Minahasa Tenggara melalui Dinas Pendidikan Minahsa Tenggara.

.Pelimpahan tugas yang di serahkan kepada Badan Keuangan Daerah setelah Dinas Pendidikan selesai melakukan verifikasi selama setahun dirasakan proses yang sangat lama ketika mahasiswa yang memasukkan berkas diawal tahun selanjutnya menerima atau pencairan di akhir tahun satu kalender

dirasa sangat tidak efektif dan efisien. Yang diharapkan bantuan tersebut dapat digunakan Mahasiswa dalam menyelesaikan studi tetapi bantuan tersebut diterima Mahasiswa yang sudah lebih dahulu Sarjana, sehingga uang yang diterima digunakan untuk keperluan pribadi di luar keperluan penyelesaian studi seperti belanja baju, handphone, dan juga untuk liburan membuat ketidaksesuaian inti dari tujuan bantuan tersebut yaitu bantuan akhir untuk penyelesaian pendidikan.

Dalam mengimplementasikan program tersebut terdapat masalah yang berimplikasi pada pencapaian program seperti: informasi mengenai program tidak tersosialisasi dengan baik sehingga tidak mengakomodir semua mahasiswa yang sedang menyelesaikan ujian proposal, skripsi, ataupun komperhensif. Program Pemerintah Kabupaten ini seakan tidak bisa diakses oleh semua mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi tingkat Perguruan Tinggi, belum lagi ketidakjelasan mengenai pencairan program bantuan akhir studi terbatasnya pemohon disebabkan juga karena adanya keengganan untuk mengurus administrasi yang terlalu banyak, dan jarak tempuh memasuki administrasi dirasa terlalu jauh.

Ketidak sesuaian tujuan dalam implementasi program yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu dalam membantu mahasiswa dalam penyelesaian pendidikan, bagi mahasiswa yang mengharapkan dan memerlukan bantuan tersebut tapi kenyataannya tidak diterimah karena dengan alasan tidak lolos verifikasi lanjutan oleh perangkat daerah teknis yang menangani bantuan, karena calon penerima yg hanya 300 Mahasiswa dengan dana 1,5 M dengan masing – masing mahasiswa menerima 5 juta Rupiah, sedangkan untuk calon penerima sudah melebihi batas maksimum yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga banyak mahasiswa yang mengharapkan dan memerlukan bantuan tersebut tidak lolos verifikasi calon penerima, sedangkan berkas awal sudah di kumpulkan lebih

dahulu. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi program pemerintah dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tinjauan Pustaka Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan di anggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (2002:70) Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk tercapai tujuan kegiatan.

Guntur Setiawan (2004:39) Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Awang (2010:39-40) Sumber daya untuk implementasi program yaitu lingkungan yang kondusif dan efektifitas organisasi merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan desentralisasi, termasuk dalam sumber daya ini adalah ketersediaan dana, administrasi, dukungan teknis juga determinasi pengeluaran dan efek dari program desentralisasi. Pengetahuan Implementator dalam kontrol keuangan, ketersediaan dan alokasi dana untuk fungsi-fungsi tertentu serta ketepatan dan ketersediaan waktu Implementator untuk meningkatkan otoritasnya, juga memengaruhi implementasi kebijakan dari sisi lain, pemerintahan dan organisasi lokal juga memberikan dukungan politik pada pimpinan, perangkat daerah dan para elitnya dan mereka juga harus menerima dukungan teknis dan administrasi dari pusat birokrasi.

Teori Merilee S. Grindle (2018:130), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (*content of police*) dan lingkungan

Implementasi (*context of implementation*). Variable tersebut mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target grup, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam buku *Hayat* (2018:128) mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman.

Teori George C. Edward Edward III dalam buku *Hayat* (2018:128) berpandangan bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu

- (1). Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- (2) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah di komunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi implementator dan sumberdaya finansial.
- (3) Disposisi, Adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka implementator tersebut

dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif.

- (4) Struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *rade tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktifitas organisasi tidak fleksibel. Menurut pandangan Edward dalam Buku *Hayat* (2018:129) sumber-sumber yang penting meliputi, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk menjalankan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Kebijakan

Kebijakan menurut Thomas R. Dye dalam *Hayat* (2018:28) ialah sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan maupun untuk tidak dilakukan (*whater government choose to do or not to do*). Dalam pengertian seperti ini, maka pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apasaja yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk apasaja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Menurut H. Hugh Heglo dalam Said Zainal Abidin (2012:6) menyebutkan kebijakan sebagai "*a course of action intended to accomplish some end*" atau suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Anderson dalam buku *Hayat* (2018:108) bahwa perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab berbagai alternatif disepakati untuk masalah

dikembangkan dan siapa berpartisipasi. Ia merupakan proses yang secara spesifik ditunjukkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Adapun pembentukan kebijakan lebih merujuk pada aspek bagaimana masalah-masalah publik menjadi perhatian para pembuat kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Bevir (2007:56) Kebijakan publik adalah kebijakan disektor publik. Sektor publik adalah porsi dari ekonomi yang mencakup seluruh level pemerintah dan perusahaan-perusahaan privat, organisasi volutir dan rumah tangga.

Parson (2006:76) Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun (*constructed*) dan didefinisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

Kay (2006:23) Kebijakan publik adalah ekspresi dari arah dan tujuan-tujuan serta cara yang dikehendaki berkenaan dengan penanganan urusan-urusan publik.

Keban (2004:55) menjelaskan bahwa *public policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi dan sebagai suatu proses, kebijakan di pandang suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Carl friedrich (2015:9) Mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Awang (2010:36) Implementasi Kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dan keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Dalam aktivitas implementasi kebijakan melibatkan berbagai faktor, baik suprastruktur maupun infrastruktur termasuk kesiapan birokrasi dalam tatanan implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Program Bantuan Penyelesaian Pendidikan

Maksud Dan Tujuan Program

Penyelenggaraan program Bantuan Akhir Studi bagi Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Minahasa Tenggara guna untuk memotivasi para mahasiswa dan pelajar di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka menyelesaikan Pendidikan diperlukan pemberian bantuan dengan mewujudkan Kabupaten Mnahasa Tenggara dalam Sukses Pendidikan sesuai dengan Program Daerah

Kriteria Penerima Program

Kriteria penerima bantuan studi bagi mahasiswa Kabupaten Minahasa Tenggara adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Warga Minahasa Tenggara;
- Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi baik Negeri maupun swasta dan dalam penyelesaian studi (minimal sudah seminar proposal)
- Kuliah pada perguruan tinggi Negeri atau swasta yang ada di Indonesia;
- Tidak sedang menerima bantuan dana sejenis beasiswa dari pemerintah atau lembaga lainnya.

Adapun mekanisme pendaftaran calon penerima bantuan penyelesaian studi diwajibkan:

- Mengajukan surat permohonan dan ditandatangani yang ditunjukkan kepada Bupati Minahasa Tenggara up Kepala Dinas Pendidikan abupaten Minahasa Tenggara dengan melampirkan:
- Proposal permohonan bantuan penyelesaian studi;
- *Fotocopy* kartu Mahasiswa yang di *fotocopy* pada satu lembar kertas HVS tampak depan dan belakang;
- Surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan yang berisikan status kuliah dan smester yang dijalani saat ini;
- *Fotocopy* kartu tanda penduduk (KTP) pemohon yang di *fotocopy* pada satu lembar kertas HVS tampak depan tampak belakang
- *Fotocopy* kartu keluarga (KK)
- Transkrip nilai dari seluru mata kuliah (semester 1 s.d semester akhir) yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan/Dekan/Direktur;
- Surat keputusan Dekan/Direktur tentang pelaksanaan ujian; proposal penelitian/karya tulis atau surat keputusan Dekan/Direktur tentang pelaksanaan ujian karya tulis/skripsi/tesis/disertasi atau surat keputusan Dekan/Direktur tentang pelaksanaan ujian komperhensif yang sah (cap basah);
- Proposal penelitian yang sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan ketua jurusan atau ketua program studi;

- Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa/bantuan pendidikan dari pemerintah ataupun lembaga lainnya;
- Diproposal masukan nomor HP pemohon dan Ketua Jurusan
- Semua berkas di jilid dengan cover warna merah untuk program S1.

Metode Penelitian

Dalam penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. menurut Creswell dalam buku Sugiyono (2016:347) Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Fokus dari penelitian ini adalah hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari implementasi program Pemerintah Daerah dalam pemberian bantuan penyelesaian pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari konsep menurut Teori Geoge C. Edward Edward III dalam buku hayat (2018:128-129) Berpandangan bahwa Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: Komunikasi; Sumberdaya; Disposisi; Struktur Birokrasi. Sesuai permasalahan penelitian, maka informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara
- Kepala Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara
- Pengelola program bantuan penyelesaian Pendidikan.
- Penerima bantuan penyelesaian pendidikan

Pembahasan

Dapat diketahui bahwa adanya kebijakan Kabupaten Minahasa Tenggara Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2017 tentang pedoman pemberian bantuan penyelesaian bagi Siswa SMA/MA, SMK dan Mahasiswa, harusnya menjadi solusi bagi pelajar yang ada di Kabupaten

Minahasa Tenggara yang menempu dunia pendidikan.

Isi kebijakan yang di muat dalam kebijakan Bupati memuat isi kebijakan dalam program ini yang target utamanya yaitu pelajar dan Mahasiswa yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan ini yang ditangani langsung oleh Dinas Pendidikan.

Dalam proses pencapaian program, Dinas Pendidikan melakukan verifikasi data yang di mulai pada awal tahun sekitar bulan maret, diberi kesempatan bagi mahasiswa yang ingin mendaftar atau memasukan berkas yang diantar langsung di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara yang berlokasi di Kelurahan Wawali kompleks Kantor Bupati Blok B.

Ukuran implementasi dalam suatu program akan terpenuhi sasaran dan tujuan yang akan di capai dalam mengimplementasikan program ini. Menurut teori George C. Edward III dalam Buku Hayat (2018:128-129) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu Komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Pada indikator ini, tujuan dari komunikasi adalah untuk mensosialisasikan program bantuan penyelesaian pendidikan pada kelompok sasaran yaitu mahasiswa agar supaya mahasiswa mengetahui informasi mengenai program ini. Komunikasi sangat penting dalam proses implementasi dimana dalam indikator komunikasi ini target sasaran bisa dapat mengetahui informasi dari proses pemasukan berkas, verifikasi data, sampai pada pencairan dana bantuan penyelesaian pendidikan.

Komunikasi disini adalah berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada kelompok sasaran. Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program dan kelompok sasaran (Mahasiswa akhir studi). Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran program bantuan penyelesaian pendidikan ini dapat di sosialisasikan

secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan tersebut.

Namun dari indikator komunikasi belum sepenuhnya tercapai karena belum ada sosialisasi di desa-desa mengenai kejelasan informasi program bantuan ini, mengingat kelompok sasaran bertempat tinggal di desa-desa, sehingga mahasiswa yang ingin mengurus bantuan penyelesaian ini tidak dapat mengetahui kapan mulai mendaftar atau memasukan berkas untuk mengurus program bantuan ini. Informasi yang didapat hanya melalui teman-teman yang kebetulan mendapatkan informasi yang didapatkan langsung di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara, informasi tersebut terkesan tidak luas agar supaya siapa yang ingin mengurus bantuan ini dapat mengetahuai, apalagi mahasiswa yang tinggal jauh dari pusat kota atau tinggal jauh dari lokasi Kantor Dinas Pendidikan terkesan tidak dapat mengetahui mengenai informasi bantuan penyelesaian pendidikan ini.

Implementasi program bantuan penyelesaian pendidikan belum cukup maksimal dalam proses komunikasi (disosialisasikan/dipublikasikan) kepada kelompok sasaran yaitu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan akhir, baik secara langsung (sosialisasi di desa-desa, di tempat ibadah, dan kegiatan pemerintahan lainnya) maupun tidak langsung (surat kabar, brosur/lefler, radio, televisie dan internet) mengenai intensitas informasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan/program bantuan penyelesaian pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Intensitas komunikasi tidak dirasakan oleh kelompok sasaran di wilayah pedesaan yang jauh dari pusat kota Ratahan. Ditahun 2019 sosialisasi mengenai program bantuan pendidikan bagi mahasiswa ini sesuai wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap target sasaran mengatakan tidak menerima informasi mengenai program ini. Dinas Pendidikan tidak mengeluarkan informasi secara intens dan menyeluruh sampai pada kelompok sasaran yang ada di pelosok desa yang jauh dari pusat Kota

Rataan. Pelaksana kebijakan disini Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara harus lebih meningkatkan intensitas komunikasi mengenai informasi tentang program bantuan penyelesaian pendidikan ini agar supaya mahasiswa yang sedang menyelesaikan pendidikan dapat mengetahui tentang bantuan ini dan langsung menyiapkan persyaratan kelengkapan berkas untuk di ajukan sehingga dapat merasakandampak dari program bantuan ini, dan mengurangi beban dalam proses akhir penyelesaian pendidikan.

2. Sumber Daya

Pada indikator ini sumberdaya yang dimiliki khususnya sumberdaya financial atau anggaran. Dalam membuat suatu kebijakan harus didukung oleh ketersediaan anggaran, karena tanpa anggaran suatu kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.

Dalam implementasi program ini ada pembatasan kuota penerima bantuan penyelesaian pendidikan oleh Dinas Pendidikan karena keterbatasan anggaran yang ada, sehingga tidak dapat menyentu semua mahasiswa yang ingin menyelesaikan pendidikan akhir, padahal mereka sangat membutuhkan bantuan ini bagi mereka yang berkatar belakang ekonomi lemah sehingga implementasi program ini terjadi kendala, dalam APBD Kabupaten Minahasa Tenggara mengenai program ini di tahun 2018 sudah cukup menyentuh mahasiswa yang ingin menyelesaikan pendidikan akhir, tapi ditahun 2019 terjadi penurunan alokasi anggaran untuk program bantuan ini sehingga cukup banyak mahasiswa yang kurang mampu dalam penyelesaian pendidikan ingin menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi tapi tidak mempergunakan dana tersebut untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus lebih memperhatikan mengenai kecukupan anggran dalam program ini, karena banyak mahasiswa yang ingin memasukan berkas tapi pendaftaran sudah di tutup oleh Dinas yang terkait karena kuota sudah cukup

memenuhi sesuai kecukupan anggaran yang ada di APBD Kabupaten Minahasa Tenggara. Ditahun 2020 menjadi mimpi buruk bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan pendidikan, karena ditahun 2020 tidak ada alokasi anggaran yang ditentukan dalam program bantuan penyelesaian pendidikan ini karena dengan alasan ada pengalihan APBD yang dialihkan ke pencegahan penularan virus Corona, sehingga ditahun 2020 program ini tidak jalan. Dilihat keadaan ekonomi Tahun 2020 sangat sulit, apalagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan pendidikan sangat sulit dalam proses akhir studi, seharusnya untuk alokasi dana ini tidak dialihkan dan program ini terus dijalankan supaya dalam masa pandemi Virus Corona ditahun 2020 ada keringanan beban masalah ekonomi bagi mahasiswa yang sementara mengurus dan berjuang untuk menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Dalam sumberdaya manusia mengenai kualitas dalam kapabilitas pegawai dalam mengimplementasikan program ini belum cukup karena pegawai yang mengurus program ini hanya satu pegawai sesuai informasi yang didapat dan program ini ditangani oleh Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

3. Disposisi

Dalam indikator ini, dilihat bahwa jika para implementator/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan/program tertentu, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan/program. Ketika sikap atau pandangan pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi sebuah program akan menjadi kompleks.

Hasil wawancara yang didapat bahwa pegawai sangat berkomitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) sesuai arahan dari pembuat kebijakan/program yakni program bantuan penyelesaian pendidikan. Pegawai Dinas Pendidikan setidaknya dapat menunjukkan tingkat disposisi yang cukup tinggi sesuai arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan

sesuai dengan harapan tugas dan tanggungjawab dari pembuat kebijakan. Program bantuan ini dijalankan sesuai apa yang diharapkan pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam hal ini mengkaji khususnya pada *Standard Operating Procedure* (SOP) dari penyeluran sudah ada dari tahapan pemasukan berkas, verifikasi data, sampai pada pencairan bantuan. Dalam proses tahapan pemasukan berkas langsung diserahkan kepada Bidang Pengembangan Pendidik dan Tenaga Pendidikan untuk proses lebih lanjut, tetapi prosesnya sangat lama dan informasi dalam verifikasi data tidak jelas bagi mahasiswa mengenai kapanmulai memasukan berkas, siapa yang lolos dalam verifikasi data dan kapan tepatnya pencairan. Untuk pencairan hanya diketahui penerimaan bantuan ini diterima di alhir tahun.

Dilihat dari struktur birokrasi mengenai (SOP serta pembagian tugas dan tanggungjawab) belum terlalu ditata dengan baik, kapasitasnya sangat kurang dan kurang jelas. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Tahun 2020 di Dinas Pendidikan mengenai pengambilan data tentang program ini, pegawainya tidak ada di kantor dan sudah rolong jabatan dan Kabid PPTP kurang mengetahui nama pegawai yang sudah pindah tersebut untuk mengambil data. Unit/satuan organisasi yang ada sudah diganti pada saat implementasi program sedang dijalankan sehingga mengenai struktur organisasi untuk proses implementasi menjadi kurang efektif dan efisien sehingga dapat mempengaruhi dalam proses implementasi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara harus lebih proaktif dalam proses implementasi program bantuan ini, dilihat kembali ditahun awal 2019 mahasiswa yang datang untuk mengecek apakah program ini masi ada atau tidak, langsung disambut oleh Kabid PPTP langsung saja memasukan berkas dan menunggu APBD Perubahan. Program bantuan ini terkesan tidak diprioritaskan oleh perancang dan penyusunan APBD yaitu Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah (PEMDA). Program bantuan ini bagi masyarakat khususnya bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang sangat membutuhkan dana untuk menyelesaikan pendidikan untuk meringani proses penyelesaian akhir pendidikan tidak terealisasi dengan baik.

Penutup

Kesimpulan

1. Dalam aspek komunikasi belum cukup baik. Belum ada sosialisasi di desa-desa mengenai kejelasan informasi program bantuan ini. Mengingat kelompok sasaran bertempat tinggal di desa-desa mereka kurang mengetahui mengenai kejelasan dari program bantuan penyelesaian pendidikan ini, Kendala yang terjadi yaitu intensitas informasi masi minim diterima oleh mahasiswa.
2. Dalam sumber daya manusia mengenai kualitas dan kapabilitas pegawai dalam mengimplementasikan program ini belum cukup karena pegawai yang mengurus program ini hanya satu orang pegawai. Mengenai sumber daya finansial belum begitu maksimal karena belum mencakup ketersediaan bagi mahasiswa yg lebih banyak, padahal mahasiswa yang kurang mampu masi banyak yang ingin mendapatkan bantuan ini tapi tidak tersentu bantuan ini karena terbatasnya anggaran yang ada.
3. Dalam aspek disposisi Kepala Dinas serta pegawai yang menangani program ini sangat berkomitmen dan bertanggung jawab dalam menjalankan program bantuan penyelesaian pendidikan ini. Karna ini merupakan program yang bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan pendidikan
4. Aspek yang keempat yaitu struktur birokrasi. Dalam aspek ini strutur birokrasi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara sangat jelas dan terstruktur

pembagian tugasnya dari Kepala Dinas sampai kepada Bawahannya memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Saran

1. Semua aspek-aspek implementaasi (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) perlu ditingkatkan lagi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara. Terutama di aspek komunikasi, mengenai intensitas informasi-informasi bantuan penyelesaian pendidikan ini. Kepastian informasi harus lebih di tingkatkan lagi agar supaya sampai kepada kelompok sasaran, khususnya sosialisasi program ini di jenjang vertikal maupun horizontal agarsupaya program ini dapat diketahui mengenai kejelasan sampai pada mahasiswa yang tinggal jauh dari Pusat Kota yaituh di desa-desa.
2. Alokasi anggaran harus lebih ditingkatkan lagi untuk program bantuan penyelesaian pendidikan ini, sehingga dapat menjangkau seluru mahasiswa yang ingin menyelesaikan pendidikan ini dapat merasakan tujuan dari program bantuan penyelesaian pendidikan. Melihat ditahun 2020 tidak ada anggaran untuk program bantuan ini karena dialihkan dalam pencegahan penyebaran Virus Corona, saya harapkan di tahun-tahun selanjutnya program bantuan ini tetap dilanjutkan karena banyak mahasiswa yang ingin menyelesaikan pendidikan tapi memiliki kendala ekonomi lemah.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2010. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta.t.p.
- Bevir, M. 2007. Encyclopedia of Governance. California: Sage Publication, Inc
- Budi Winarno. 2008. Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro. Jakarta: Prenada Media Group.
- Edi Suharto. 2010. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- George C. Edward Edward III. 2018. Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro. Jakarta: Prenada Media Group
- Guntur Setiawan.2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hayat. 2018. Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro. Jakarta: Prenada Media Group.
- H. Hugh Heglo. 2018. Reformasi Kebijakan Publik. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kay, A. 2006. The Dynamics of Public Policy: Theory and Evidence. Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Keban, Yermias, T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu. Penerbit Gava Media Yogyakarta.
- Merilee S. Grinle. 2018. Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Muhamin, Suti'ah.2009. Manajemen Pendidikan. Jakarta: Kencana
- Mudasir.2012. Desain Pembelajaran. Indragiri Hulu: STAI Nurul Falah.
- Mardia Hayati. 2012. Desain Pembelajaran Berbasis Karakter. Pekanbaru: Al-Mujtahadah press.
- Parson, W. 2006. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Grup
- Sugiono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI.
- Winamu. 2007. Reformasi Kebijakan Publik Perspektif Makro dan Mikro. Jakarta: Prenada Media Group.